



Wacana Penerapan Normal Baru di DIY Awat, Muncul Gelombang Baru Covid-19

YOGYA (KR) - Wacana melonggarkan pembatasan atau bahkan mempersiapkan untuk masuk fase kenormalan baru (The New Normal) perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati oleh Pemerintah Daerah DIY. Jangan sampai keputusan pelonggaran itu justru menimbulkan gelombang baru atau puncak baru penularan Covid-19 yang dampaknya lebih besar dibanding sebelumnya.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Guru Besar, Universitas Gadjah Mada (DGB UGM) Prof Drs Koentjoro MBS PhD kepada *KR*, Kamis (4/6). Menurut Koentjoro, banyak faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan pelonggaran pembatasan. Antara lain perlu meminta pendapat para ahli epidemiologi, kapan sebaiknya pelonggaran tersebut dilakukan. Meskipun di DIY jumlah kasus positif Covid-19 cenderung menurun, tapi angkanya masih tinggi. "Jangan gegabah, dipersiapkan yang benar, dikaji

betul, jangan sampai seperti peribahasa Jawa *mburu uceng kelangan deleg* atau mengejar sesuatu yang kecil tetapi kehilangan miliknya yang lebih besar," tuturnya.

Pertimbangan yang lain, kata Prof Koentjoro adalah seberapa bagus daya tahan tubuh (imunitas) masyarakat Yogyakarta menangkal Covid-19. Kemudian perlu dipersiapkan protokol kesehatan yang jelas. Jika protokol kesehatannya sudah siap, sejauhmana kedisiplinan masyarakatnya untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut dalam ke-

hidupan sehari-hari. Lalu yang tak kalah penting, bagaimana sistem perlindungan untuk kelompok rentang (lansia dan orang dengan penyakit penyerta), juga kesiapan rumah sakit atau sistem kesehatannya. "Kalau rumah sakit siap menampung jika terjadi lonjakan pasien, ya silakan (dibuka pelonggaran). Tapi kalau belum siap, itu amat berbahaya," tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Prof Koentjoro, keinginan untuk melonggarkan pembatasan atau penerapan kenormalan baru sebetulnya adalah pertentangan antara kebutuhan hidup dengan faktor ekonomi, yang mana pengaruh ekonomi kapitalis begitu kuat. Namun jika masyarakatnya masih takut ke luar rumah (berbelanja), tentu pusat-pusat perekonomian akan tetap sepi. "Yang justru perlu dikedepankan,

*** Bersambung hal 7 kol 3**

Awas, Sambungan hal 1

bahwa Yogyakarta adalah kota istimewa dengan nilai-nilai kegotong-royongan yang tinggi. Itu menjadi modal berharga untuk mengatasi persoalan ekonomi, masyarakat saling tolong menolong memenuhi kebutuhan dasar pangan," katanya.

Lalu yang tak kalah penting diperhatikan, menurut Prof Koentjoro, adalah Yogyakarta sebagai kota pelajar dan mahasiswa yang artinya kualitas perkuliahan/mahasiswa tergantung para guru besarnya. Padahal usia para guru besar tersebut sudah tua-tua yang masuk kelompok rentan. Jika banyak yang terinfeksi virus, kemudian banyak guru besar atau guru senior yang meninggal dunia, tentu menjadi kerugian tersendiri bagi dunia pendidikan di Yogyakarta. Di sisi lain, dengan adanya pandemi ini, tren mahasiswa untuk kuliah ke luar negeri pasti

akan turun. Sehingga perguruan tinggi besar di Yogyakarta harus bersiap menampung mereka. "Sistem pendidikan harus dipersiapkan dengan baik untuk merespons pandemi ini," pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY hingga saat ini masih terus berupaya mematangkan 'Standard Operating Procedure' (SOP) yang akan diberlakukan dalam era kenormalan baru. Nantinya SOP tersebut akan menjadi acuan segala kegiatan Pemda DIY maupun masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyusun SOP sesuai bidang masing-masing. SOP dari tiap-tiap OPD itu yang kemudian menjadi pembahasan dalam rapat. (Dev/Ria/Ira)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005